

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini berisi mengenai penjelasan dan berbagai pengertian beserta uraian lainnya yang berkaitan dengan PDB, inflasi, IPM dan Penerimaan Pajak.

2.1.1. Penerimaan Pajak

a) Pengertian Penerimaan Pajak

Pajak di Indonesia dalam peran demokrasi adalah bentuk sistem kerja sama, fungsi ini berkaitan dengan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat yang membayar pajak. Layanan pemerintah meliputi perbaikan transportasi, pembangunan, fasilitas, dan peningkatan pendidikan di Indonesia (Akbar & Hapsari, 2023). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara berupa pungutan wajib oleh negara yang kemudian ditujukan kepada individu perseorangan dan perusahaan. Dari pungutan tersebut nanti diterima dalam bentuk penerimaan dalam negeri dari negara tersebut dan akan disalurkan juga untuk kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan unsur penting yang mencerminkan kekayaan atau kondisi moneter suatu negara, sehingga pajak menjadi salah satu sumber utama untuk menjaga keberlangsungan kehidupan negara.

Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara dalam bentuk pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. *Tax ratio* adalah indikator untuk mengetahui seberapa tingkat pemungutan pajak yang telah dilakukan negara. *Tax ratio* yang semakin tinggi maka merupakan indikator bahwa kinerja dan

kemampuan negara dalam penerimaan pajak semakin baik (Puspasari & Gazali, 2022).

Teori ekonomi makro tentang *multiplier* pajak dapat dipahami dalam konteks interaksi antara kebijakan pajak dan berbagai agen ekonomi (misalnya, individu, perusahaan, dan pemerintah) dalam sistem ekonomi yang lebih besar. Beberapa teori ekonomi makro membahas bagaimana kebijakan pajak dapat memengaruhi perekonomian secara keseluruhan, serta bagaimana keputusan pajak yang diambil oleh berbagai pihak dapat berinteraksi dan memperbesar dampaknya. Pengeluaran pemerintah lebih dominan terhadap PDB dibandingkan dengan pajak menunjukkan masih cukup efektifnya kebijakan ini untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam masa resesi dibandingkan dengan pajak. Dampak pengeluaran pemerintah terhadap penurunan inflasi dapat dijelaskan melalui efek *multiplier* dari pengeluaran investasi, termasuk sektor infrastruktur, yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan belanja rutin. Investasi pemerintah dalam infrastruktur diperkirakan mampu meningkatkan distribusi barang dan jasa, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengurangan angka inflasi. Dalam kerangka berpikir Keynes, kebijakan fiskal bisa menggerakkan ekonomi karena peningkatan dalam pengeluaran pemerintah atau pengurangan pajak memiliki efek pengganda dengan cara mendorong kenaikan permintaan untuk barang-barang konsumsi rumah tangga (Silalahi & Ginting, 2020).

b) Faktor Penerimaan Pajak

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia seperti:

1. Ketidakpastian atau *uncertainty* kegiatan ekonomi

Iklim perekonomian disebut bergantung pada tren perbaikan berbagai indikator perekonomian yang belum sepenuhnya berlanjut seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), *Purchasing Managers, Index* (PMI), dan harga komoditas.

2. Penurunan basis pajak akibat pandemi Covid-19.

Kendati pemerintah secara proaktif memberikan stimulus fiskal dari sisi perpajakan kepada dunia usaha, peningkatan covid-19 dan kebijakan PPKM darurat diyakini mempunyai peran dalam perlambatan aktivitas ekonomi.

3. Jenis pajak tertentu sulit untuk *rebound*

Kondisi ini disebabkan adanya tekanan pada basis pajak seiring pemulihan ekonomi 2022. Situasi saat ini diperkirakan belum dapat mendorong pertumbuhan pajak kembali pada level sebelum pandemi.

4. Dominasi sektor komoditas dan perdagangan dalam penerimaan negara sehingga rentan terhadap guncangan global

Sektor komoditas mengalami stagnasi harga bahkan cenderung mengalami penurunan sejak 2016. Seiring dengan perbaikan ekonomi, khususnya Amerika Serikat, China, Eropa, dan Jepang, harga komoditas mulai berangsur pulih sehingga pemerintah tetap harus mencermati tren tersebut.

5. Tingginya *shadow economy*, terutama mengenai ekonomi digital.

Beberapa bentuk ekonomi digital seperti perdagangan elektronik tumbuh pesat selama pandemi Covid-19. Namun, dari sudut pandang perpajakan, sektor tersebut masih sulit dipakai.

6. Situasi dan kebijakan pajak global yang masih menjadi fokus perhatian pada 2022

Konsensus negara G-7 terhadap minimum tarif pajak korporasi teknologi besar akan mempengaruhi peta kompetensi penurunan tarif perpajakan global dan iklim investasi antarnegara.

c) Teori Penerimaan Pajak

1. Teori Ekonomi Keynesian

Dalam (Ismail et al., 2022) buku “*The General Theory of Employment, Interest and Money*” yang merupakan karya tulis Keynes yang paling terkenal. Buku yang ditulis oleh Keynes ini sebagai reaksi terhadap depresi besar-besaran yang terjadi pada tahun 1929-1939 yang tidak berhasil dipecahkan dengan metode klasik dan neo-klasik. Dalam bukunya Keynes menerangkan bahwa pemerintah harus melakukan ikut campur tangan dalam mengendalikan perekonomian nasional dengan regulasi-regulasi secara aktif sehingga dapat mempengaruhi arah gerak perekonomian.

Menurut teori ini, konsumsi satu orang dalam perekonomian menjadi pendapatan bagi orang lain dalam perekonomian yang sama. Ketika resesi besar terjadi, masyarakat secara alami merespons dengan membelanjakan atau, bisa dikatakan menimbun uang mereka. Solusi Keynes untuk menyelesaikan masalah kemacetan ekonomi adalah dengan melakukan intervensi pada pemerintahan sektor publik.

Penerimaan pajak memegang peranan sentral sebagai sumber pembiayaan utama negara yang memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi intervensinya

dalam perekonomian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp2.034,55 triliun, dan meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp2.118,35 triliun. Kenaikan ini mencerminkan pentingnya pajak dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan peran penerimaan pajak ini sejalan dengan usaha pemerintah untuk terus memperbaiki pengelolaan fiskal demi memperkuat dasar pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam periode 11 tahun, target pajak lainnya tidak tercapai, puncaknya terjadi pada tahun 2015 ketika pencapaian hanya 83%.

2. Teori Kepatuhan

Menurut Taylor (2006) sebagaimana dikutip dalam Amalia (2020) kepatuhan dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan berdasarkan keinginan lain atau memenuhi permintaan orang lain. Kepatuhan merujuk pada perilaku yang muncul sebagai reaksi terhadap permintaan langsung dari pihak lain. Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dapat mendorong individu, terutama wajib pajak, untuk lebih mengikuti aturan yang ada, sehingga mendorong mereka untuk mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan akurat, lengkap, dan jelas, melakukan perhitungan dengan tepat, melakukan pembayaran tepat waktu, serta menghindari penerimaan surat teguran.

Dalam konteks peningkatan penghasilan dari pajak, salah satu faktor yang berperan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang patuh tidak selalu

berarti mereka yang membayar pajak dalam jumlah besar dan secara tepat waktu melaporkan melalui SPT, tetapi mereka yang tahu, memahami, serta menjalankan hak dan kewajiban mereka di bidang perpajakan. Selanjutnya, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak dan niat serius wajib pajak untuk melaporkan serta membayar kewajiban perpajakan mereka dapat menggambarkan tingkat kesadaran wajib pajak, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan melalui Pendidikan akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Kahpi, 2020).

2.1.2. Produk Domestik Bruto

a) Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto adalah total nilai produksi barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh masing-masing produsen di suatu negara selama periode tertentu. Arti Produk Domestik Bruto dan produk bruto sebenarnya berbeda. Dalam GNP, nasional digunakan karena definisinya adalah kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara di dalam negeri dan di luar negeri harus masuk dalam PNB, sedangkan istilah nasional digunakan pada batas wilayah suatu negara, termasuk orang asing dan perusahaan asing. Keberadaan perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara akan membantu meningkatkan nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara, operasi ini merupakan bagian penting dari kegiatan perekonomian negara.

Nilai produksi yang disumbangkan harus diperhitungkan dalam pendapatan nasional dalam bentuk PDB (Meijon , 2019).

b) Faktor Produk Domestik Bruto

Todaro (2003) dalam Pambudi & Miyasto (2013) pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk erat kaitannya dengan jumlah penduduk aktif dan merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi perekonomian. Kapasitas pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh sejauh mana perekonomian mampu menyerap tenaga kerja yang bekerja secara produktif.

2. Akumulasi Modal

Akumulasi modal adalah kombinasi investasi baru atas tanah, fasilitas fiskal dan sumber daya manusia, pada pendapatan saat ini, yang dimaksudkan untuk meningkatkan produksi di masa depan.

3. Kemajuan Teknologi

Menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan kemajuan teknologi karena mempunyai dampak yang signifikan, kemajuan teknologi dapat menawarkan metode baru dan menyempurnakan metode kerja.

c) Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi yang menyangkut ekonomi nasional cukup banyak, namun hanya beberapa saja yang langsung terkait dengan kebijakan yang dapat

ditempuh oleh pemerintah daerah. Teori yang akan dibahas adalah teori ekonomi klasik, teori Harrod-Domar, teori neoklasik, teori Solow-Swan.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Hapsari (2013) menyebutkan teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan secara sistematis oleh Adam Smith, Joseph Schumpeter dan John Maynard Keynes. Inti ajaran Smith percaya bahwa pembangunan ekonomi paling baik didorong dalam lingkungan bebas yang dioperasikan sesuai dengan “hukum alam”. Smith merupakan peneliti paling komprehensif dan sistematis hingga saat ini, maka pemikirannya menjadi landasan ilmu ekonomi klasik. Pendapat Joseph Schumpeter mengatakan bahwa posisi stasioner tidak akan terjadi karena manusia akan terus melakukan inovasi.

Teori Keynes (*Keynesian Theories*) menguraikan kebijakan fiskal serta kebijakan moneter yang berkaitan dengan inflasi. Dalam pandangan ini, terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Keunikan teori ini adalah pada jangka pendek (*short-run*), kurva penawaran agregat memiliki nilai positif, yang menunjukkan bahwa ketika harga meningkat, produksi juga akan meningkat.

2. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Menurut (Tarigan 2007), konsep pertumbuhan ekonomi muncul hampir bersamaan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Pada intinya, gagasan yang diajukan oleh Harrod dan Domar serupa, meskipun mereka menggunakan metode perhitungan yang berbeda. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes mengevaluasinya dari

perspektif jangka pendek, sedangkan Harrod-Domar memandangnya dari sudut jangka panjang. Prinsip dasar dari teori Harrod-Domar didasarkan pada:

- Perekonomian bersifat tertutup
- Hasrat menabung adalah konstan
- Proses produksi memiliki koefisien yang tetap
- Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

3. Teori Neoklasik

Dalam Hapsari (2013) dipaparkan bahwa teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow dari Amerika Serikat dan T.W. Swan dari Australia. Teori ini juga dikenal dengan teori Solow-Swan dengan memanfaatkan elemen pertumbuhan populasi, akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan jumlah output yang saling berhubungan. Selain itu, Solow-Swan menerapkan model fungsi produksi yang memungkinkan substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L). Oleh karena itu, syarat untuk pertumbuhan yang stabil dalam model ini kurang ketat karena adanya kemungkinan substitusi antara modal dan tenaga kerja.

Menurut teori Solow, ada beberapa cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan bagian tabungan akan mempercepat akumulasi modal dan memperlancar pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meningkatkan investasi yang tepat dalam perekonomian, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, juga penting. Mendorong perkembangan teknologi dapat meningkatkan pendapatan

per pekerja, sehingga memberikan peluang untuk berinovasi di sektor swasta akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi.

4. Teori Uang dan Moneter

Dalam Fahmi (2019) Teori uang dan moneter (*money and monetarism theories*) diperkenalkan oleh Friedman. Teori ini berfokus pada elemen sisi penawaran jangka panjang (*long-run supply side properties*) di mana *Quantity Theory of Money* dan *Neutrality of Money* adalah dua teori yang mendukung elemen sisi penawaran jangka panjang ini. Dalam *Quantity Theory of Money*, Friedman mengaitkan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dengan menyamakan total uang yang dibelanjakan dengan total uang yang ada dalam perekonomian. Friedman berpendapat bahwa inflasi yang terjadi disebabkan oleh uang beredar atau money supply yang berpengaruh lebih besar dibandingkan dengan akibat dari pertumbuhan ekonomi (tingkat produksi). Friedman menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang, inflasi disebabkan oleh pertumbuhan uang dan tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Jika laju pertumbuhan uang beredar melebihi laju pertumbuhan ekonomi, maka inflasi akan terjadi.

2.1.3. Inflasi

a) Pengertian Inflasi

Inflasi bisa didefinisikan sebagai proses peningkatan harga-harga yang terjadi dalam sebuah perekonomian. Setiap negara di seluruh dunia selalu berhadapan dengan isu inflasi. Namun, angka inflasi yang menunjukkan persentase kenaikan harga, bervariasi antar negara dan juga berbeda dari satu periode ke periode lainnya.

Oleh karena itu, tingkat inflasi suatu negara dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai keadaan ekonomi yang dihadapi oleh negara tersebut. Angka inflasi rendah yaitu berada di bawah 2 atau 3 persen (Budi , 2017). Inflasi merupakan salah satu permasalahan klasik suatu perekonomian yang menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat, hal ini berdampak negatif terus menerus terhadap perekonomian makro. Hal ini menempatkan persoalan inflasi sebagai indikator penting untuk menjaga stabilitas perekonomian. Krisis mata uang yang terjadi ditengah menyebabkan meroketnya tingkat inflasi Indonesia, sehingga berdampak pada menurunnya daya beli dan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Perkembangan tersebut menjadikan inflasi sebagai indikator strategis dalam upaya menarik perekonomian nasional keluar dari resesi. Hingga saat ini berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik dalam mengendalikan inflasi dari sisi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, serta menjalankan kebijakan dari sisi penawaran agregat yang terkait dengan sisi produksi.

b) Faktor Inflasi

Apabila ditelaah lebih lanjut, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya inflasi di Indonesia yaitu:

1. Peningkatan Permintaan Masyarakat (*demand pull inflation*)

Peningkatan permintaan masyarakat (*demand pull inflation*), yaitu inflasi yang didorong oleh permintaan terjadi ketika agregat tumbuh lebih cepat daripada penawaran agregat, ketidakseimbangan antara permintaan yang tinggi dan kapasitas produksi yang terbatas menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Kata lain, peningkatan permintaan masyarakat terjadi melalui “tarikan” di sisi dimana

konsumen dan pelaku usaha bersaing untuk mendapatkan barang dan jasa dalam jumlah melebihi kapasitas produksi, sehingga menaikkan harga. Pengeluaran yang berlebihan ini menyebabkan inflasi.

Karena desakan naiknya biaya produksi, serta keduanya. Beberapa faktor penentu inflasi yang termasuk dalam tipe inflasi permintaan antara lain: likuiditas perekonomian yang terjadi melalui peningkatan jumlah uang beredar, harga minyak mentah, apresiasi nilai tukar rupiah, produktivitas dan jenis inflasi karena permintaan musiman. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian yang ditandai dengan kenaikan harga-harga yang mengakibatkan turunnya daya beli. Inflasi seringkali disertai dengan turunnya tingkat tabungan atau akibat peningkatan dan rendahnya konsumsi masyarakat dalam jangka panjang (Ambok Pangiuk, 2015).

c) Teori Inflasi

1. Teori Kuantitas

Dalam Soekartawi (2010) dijelaskan bahwa teori kuantitas menyoroti proses inflasi ditinjau dari jumlah uang beredar dan psikologi atau ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga di masa depan, menurut teori ini inflasi tidak dapat terjadi kecuali terjadi peningkatan jumlah uang beredar. Dalam teori kuantitas terdapat dua aliran yaitu teori kuantitas tradisional dan teori kuantitas modern, pada dasarnya teori kuantitas tradisional adalah hipotesis mengenai penyebab utama nilai uang atau tingkat harga. Teori ini membawa pada kesimpulan bahwa perubahan yang terjadi pada nilai uang atau tingkat harga adalah akibat dari perubahan jumlah uang beredar, peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menyebabkan penurunan nilai.

Hubungan jumlah uang beredar dengan tingkat harga dapat dijelaskan dengan tiga peningkatan, pertukaran, persamaan versi saldo kas dan persamaan versi pendapatan persamaan Cambridge. Persamaan pertukaran atau keseimbangan adalah sebuah pengungkapan. Teori uang hasil refleksi seorang ekonom yaitu Irving Fisher. Teori ini bermula dari teori yang kemudian berkembang menjadi teori tentang penggunaan uang dalam perekonomian. Identitas yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa uang yang dikeluarkan oleh pembeli harus sama dengan uang yang diterima oleh penjual.

Pendekatan saldo kas menganggap persamaan Cambridge sebagai persamaan antara jumlah uang beredar di sisi kiri dan permintaan uang di sisi kanan, pendekatan ini lebih menekankan pada perilaku individu dalam mengambil keputusan mengenai jumlah uang yang dibutuhkan untuk bertransaksi. Dalam hal ini selain dipengaruhi oleh transaksi, permintaan uang juga dipengaruhi oleh banyaknya kekayaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat, pengorbanan atau cost opportunity dari mata uang tersebut, dan harapan masyarakat, dalam merumuskan modelnya, teori Cambridge menyederhanakan dengan asumsi bahwa jika hal-hal lain tetap konstan, maka nominal permintaan uang akan sebanding dengan tingkat transaksi, sehingga rumusan Pigou pada akhirnya tidak terlalu bagus. Berbeda dengan persamaan pertukaran Fisher.

Berhubungan dengan hal tersebut, yang menyangkut pengaruh warga negara mengenai kenaikan harga di masa depan terhadap pembentukan inflasi, dapat disebutkan beberapa kemungkinan situasi. Situasi pertama adalah masyarakat tidak mengharapkan kenaikan harga dalam beberapa bulan mendatang. Dalam hal ini,

Sebagian besar dari peningkatan jumlah uang beredar akan diterima oleh masyarakat untuk meningkatkan likuiditas. Artinya sebagian besar uang dibelanjakan untuk pembelian barang, sehingga tidak terjadi kenaikan harga barang. Situasi kedua adalah dimana masyarakat mulai menyadari adanya inflasi, artinya masyarakat mulai mengharapkan kenaikan harga. Peningkatan jumlah uang beredar tidak lagi diterima masyarakat untuk menambah likuiditasnya, tetapi digunakan untuk barang. Dari sudut pandang masyarakat di dalamnya terjadi peningkatan permintaan sehingga harga suatu barang pun meningkat. Jika masyarakat mengharapkan bahwa harga barang akan meningkat di masa depan sesuai dengan tingkat inflasi sebelumnya, maka peningkatan jumlah uang beredar akan meningkatkan permintaan barang sepenuhnya. Situasi ketiga adalah situasi yang terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi, dalam situasi ini masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Peningkatan jumlah uang beredar akan mengakibatkan kenaikan harga dengan persentase yang lebih besar daripada persentase kenaikan uang.

2. Teori Keynesian

Dalam Soekartawi (2010) dipaparkan bahwa teori inflasi Keynes terjadi karena masyarakat ingin hidup melebihi kemampuan ekonominya. Dengan kata lain, proses inflasi adalah suatu proses perebutan bagian produk antara pihak-pihak dalam masyarakat yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat diberikan oleh masyarakat. Proses rush ini pada akhirnya terwujud dalam kondisi dimana permintaan masyarakat terhadap kondisi dimana permintaan masyarakat

terhadap barang melebihi jumlah barang yang tersedia atau dengan munculnya apa yang disebut dengan kesenjangan inflasi.

3. Teori Struktural

Teori ini menjelaskan proses inflasi jangka panjang di negara berkembang, menurut teori ini, beberapa faktor yang dapat menyebabkan inflasi pada perekonomian negara berkembang yaitu:

1) Inelastis penerimaan ekspor yaitu yang nilainya tumbuh secara perlahan sehubungan dengan pertumbuhan sektor, kelambatan ini disebabkan pasokan atau produksi barang ekspor tidak bereaksi terhadap kenaikan harga, pertumbuhan pendapatan ekspor yang lambat ini berarti peningkatan kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan. Akibatnya, negara-negara berkembang berupaya mencapai pertumbuhan tertentu dan mengadopsi kebijakan pembangunan yang menekankan pada peningkatan produksi dalam negeri dibandingkan produksi impor sebelumnya, meskipun produksi impor dalam negeri seringkali memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan barang impor serupa. Jika proses substitusi impor meluas maka biaya produksi juga akan menyebar ke berbagai tingkat sehingga terjadi inflasi.

2) Inelastis pasokan atau produksi bahan pangan negara. Peningkatan bahan makanan meningkatkan upah yang dipekerjakan sehingga meningkatkan upah yang dipekerjakan sehingga meningkatkan biaya produksi, yang pada akhirnya meningkatkan harga barang. Kenaikan harga barang-barang tersebut akan menyebabkan kenaikan upah, yang selanjutnya akan menjadi yang diikuti dengan

kenaikan harga. Begitu seterusnya proses akan berhenti jika harga pangan tidak terus meningkat.

4. Teori Fiskal Moneteris

Menekankan pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal (perpajakan dan pengeluaran pemerintah) dan kebijakan moneter (pengendalian jumlah uang beredar) dalam mengelola perekonomian secara keseluruhan. Pandangan ini berakar dari pemikiran ekonomi moneteris, yang dipelopori oleh Milton Friedman, yang menyatakan bahwa “inflasi selalu dan di mana pun merupakan fenomena moneter” (Friedman, 1996). Dalam konteks perpajakan, inflasi yang bersumber dari peningkatan jumlah uang beredar dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak secara nominal. Hal ini terjadi karena inflasi mendorong kenaikan harga dan pendapatan nominal, yang pada gilirannya memperluas basis pajak, terutama untuk jenis pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Selain itu, dalam sistem pajak progresif, inflasi dapat menyebabkan efek bracket creep, di mana wajib pajak masuk ke dalam kelompok tarif pajak yang lebih tinggi, meskipun daya beli riil tidak meningkat, sehingga meningkatkan penerimaan negara Dornbusch et al (2019).

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

a) Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan gambaran menyeluruh mengenai pembangunan manusia di suatu wilayah, serta kegiatan pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut. Evolusi angka IPM memberikan indikasi adanya satu atau penurunan kinerja manusia di suatu wilayah. IPM adalah pengembangan

potensi individu dan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan nasional. Tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menjamin ketersediaan akses kepada kebutuhan dasar manusia, seperti kesehatan, Pendidikan, dan layanan sosial (BPS, 2017).

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat menjadi modal pembangunan yang kualitasnya memadai, hal ini merujuk pada konsep bahwa manusia adalah pelaku, pelaksana dan penerima manfaat pembangunan. Artinya dengan jumlah penduduk yang berkualitas rendah, mereka akan lebih berperan sebagai penikmat dan kurang berperan sebagai pelaku pembangunan. Belakangan ini pembahasan mengenai sumber daya manusia semakin banyak terdengar. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari kesadaran bersama bahwa manusia bukan hanya penikmat dari pembangunan. Selain itu, ada juga kesadaran bahwa pembangunan tidak bisa bergantung hanya pada SDA (BPS, 2017).

Selama 10 tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami peningkatan. Di tahun 2023, IPM Indonesia berhasil mencapai angka 74,39 %. Hal ini mengindikasikan pembangunan manusia Indonesia masuk kategori tinggi. Pembangunan manusia menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria pembangunan manusia, yaitu:

1. $IPM < 60$ = IPM rendah
2. $60 < IPM < 70$ = IPM sedang
3. $70 < IPM < 80$ = IPM tinggi
4. $IPM > 80$ = IPM sangat tinggi

b) Aspek Indeks Pembangunan Manusia

Berbagai kriteria telah banyak digunakan untuk menilai kinerja pembangunan, tetapi mungkin tidak seragam karena tidak dapat digunakan untuk membandingkan antar daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dikembangkan oleh United Nations Development Program (UNDP), pada dasarnya dimaksudkan untuk menjawab jenis pertanyaan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa IPM, seperti indeks komposit lainnya, dirancang untuk menggambarkan realitas yang rumit seperti pembangunan manusia, tetapi tetap memiliki kekurangan karena belum mencakup semua aspek pembangunan manusia, terutama jika dihubungkan dengan sistem nilai yang dianut oleh bangsa yang menganggap aspek spiritual sama pentingnya dengan aspek material. Oleh karena itu, IPM seharusnya dipandang hanya sebagai petunjuk atau indikator dari kondisi aktual pembangunan manusia.

Sebagai petunjuk atau indikator, IPM dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup:

1. Dimensi umur panjang dan sehat;
2. Dimensi pengetahuan dan;
3. Dimensi kehidupan yang layak;

Terkait dengan percepatan pembangunan manusia diperlukan pertumbuhan ekonomi, tetapi itu belum cukup, masih ada syarat lain; yaitu distribusi pendapatan dan alokasi anggaran publik. Kedua syarat tambahan ini penting untuk memastikan bahwa semua penduduk dapat merasakan manfaat dari pembangunan. Akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan adalah hal yang paling fundamental bagi penduduk, karena kedua faktor ini sangat memungkinkan penduduk untuk

meningkatkan kemampuan dasar mereka yang pada akhirnya dapat meningkatkan indikator atau komponen IPM.

c) Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran gabungan yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pencapaian pembangunan manusia di sebuah negara. IPM mengkombinasikan berbagai elemen kesejahteraan manusia dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kualitas hidup di suatu negara. Berikut adalah elemen-elemen utama dari IPM:

1. Harapan Hidup Pada Lahir

Merupakan rata-rata umur yang diharapkan bagi seorang bayi yang baru lahir untuk bertahan hidup, jika tingkat kematian pada berbagai usia selama periode tersebut tidak berubah. Ini bertujuan untuk menilai kesehatan dan kualitas layanan kesehatan di suatu negara. Harapan hidup yang lebih tinggi biasanya menunjukkan sistem kesehatan yang lebih baik dan kondisi kehidupan yang lebih baik.

2. Pendidikan

a. Harapan Pendidikan

Rata-rata tahun yang diharapkan seorang anak usia sekolah untuk menjalani pendidikan selama hidupnya. Ini mencerminkan akses serta peluang pendidikan dalam negara itu. Tujuannya adalah untuk menilai kemungkinan akses pendidikan di masa mendatang bagi anak-anak dan remaja.

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata durasi tahun pendidikan yang telah diperoleh oleh orang dewasa (usia 25 tahun ke atas). Ini mengukur realisasi pendidikan sejati di kalangan orang

dewasa. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi tingkat pencapaian pendidikan yang sesungguhnya dalam masyarakat dan mutu sistem pendidikan yang tersedia.

3. Pendapatan

Diukur dengan Gross National Income (GNI) per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP). Ini memberikan gambaran mengenai rata-rata pendapatan yang diterima oleh orang-orang di negara itu. Bertujuan untuk menilai sejauh mana kemakmuran ekonomi dan kemampuan individu untuk memperoleh barang dan jasa.

d) Teori Indeks Pembangunan Manusia

1. Teori Human Capital

Teori ini menyatakan bahwa individu dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Becker menganggap bahwa pengeluaran untuk pendidikan dan pelatihan adalah bentuk investasi yang serupa dengan investasi dalam modal fisik, karena keduanya diharapkan menghasilkan pengembalian di masa depan. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan, secara tidak langsung, terhadap penerimaan pajak negara (Backer, 2016).

2. Teori Klasik Adam Smith

Dalam Todaro (2015) Adam Smith berpendapat bahwa manusia merupakan elemen produksi utama yang menentukan kemakmuran sebuah bangsa. Ia beralasan bahwa alam (tanah) tidak memiliki makna tanpa adanya sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengolahnya sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan.

Selain itu, Adam Smith juga mencatat bahwa penempatan sumber daya manusia secara efisien adalah awal dari pertumbuhan ekonomi. Penempatan sumber daya manusia yang efisien adalah syarat yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

3. Teori Klasik Jean Baptiste Say

Jean Baptiste Say merupakan seorang ekonom terkemuka dari Perancis yang dilahirkan di Lyon, Perancis pada tahun 1767. Pada tahun 1799, ia bergabung dengan Tribunat Napoleon, saat di mana Napoleon menjadi seorang diktator yang sangat ingin berkuasa. Di tahun 1806, Say menerbitkan karyanya yang berjudul *A Treatise on Political Economy, or the Production, Distribution, and Consumption of Wealth* (Madema, 2014).

J.B. Say berpendapat bahwa yang menciptakan permintaan bukanlah uang, melainkan barang atau jasa yang diproduksi. Ia juga menyatakan bahwa uang hanya merupakan alat untuk bertukar, dan penyebab utama dari depresi ekonomi adalah bukan kekurangan uang, melainkan minimnya penjualan oleh para petani, pengusaha, dan produsen barang serta jasa lainnya. Dalam bukunya, J.B. Say menegaskan bahwa, "uang hanyalah alat tukar; ketika perdagangan selesai, apa yang terjadi adalah seseorang membayar suatu produk dengan produk yang lain."

4. Teori Malthus

Thomas Robert Malthus adalah orang yang pertama kali mengungkapkan kekhawatiran tentang kemungkinan krisis. Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk berlangsung menurut deret geometri, sedangkan produksi makanan berjalan sesuai dengan deret aritmatika. Selain itu, Malthus juga mengemukakan teori mengenai asuransi, di mana Malthus menjelaskan tentang

reasuransi konvensional, suatu kontrak antara dua pihak yang berkomitmen untuk membayar premi asuransi kepada perusahaan reasuransi. Malthus juga menyatakan bahwa dalam konteks asuransi konvensional, terdapat peran dan fungsi individu untuk saling mendukung secara kolektif dalam situasi sulit. Pandangan ini dikenal dengan sebutan teori fungsional ekonomi (Feldman, 2015).

5. Teori Keynes

John Maynard Keynes dikenal sebagai tokoh ekonomi yang sering mengkritik pandangan-pandangan dari aliran ekonomi klasik. Salah satu argumen utama Keynes adalah bahwa tidak ada mekanisme otomatis dalam perekonomian yang mampu menjamin tercapainya keseimbangan pada tingkat penggunaan tenaga kerja secara penuh. Menurutnya, pasar tidak selalu mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan efisien terhadap perubahan kondisi ekonomi. Hal ini terlihat jelas dalam analisisnya mengenai pasar tenaga kerja, di mana ia menekankan bahwa upah tidak serta-merta menyesuaikan diri untuk menghilangkan pengangguran. Dalam banyak kasus, permintaan agregat yang rendah dapat menyebabkan tingkat pengangguran tinggi yang bertahan dalam jangka waktu lama, tanpa adanya dorongan otomatis dari pasar untuk memperbaiki kondisi tersebut. Oleh karena itu, Keynes menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengintervensi perekonomian untuk mencapai keseimbangan yang lebih optimal, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas ekonomi (Mankiw, 2016).

6. Teori Harrod Domar

Teori ini juga dikenal sebagai teori pertumbuhan. Berdasarkan teori ini, investasi tidak hanya menghasilkan permintaan, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi

yang memerlukan permintaan yang lebih tinggi agar produksi tetap stabil. Apabila kapasitas yang lebih besar tidak didukung oleh permintaan, maka surplus akan terjadi dan oleh penurunan produksi.

3.1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti selanjutnya. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi penulis.

Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<i>Does GDP Affect To Tax Revenue?</i> (Indri Arrafi Juliannisa, Raden Parianom, Andi Abrianto, 2023)	X= Produk Domestik Bruto (GDP), Y= Penerimaan Pajak, dan menggunakan data kuantitatif	X=Uang beredar, Jumlah Penduduk, dan metode penelitian menggunakan <i>Newey-west</i> HAC	PDB memiliki efek positif signifikan terhadap penerimaan pajak. kesadaran membayar pajak.	<i>EcceS (Economics Social and Development Studies)</i> Volume 10 Number 1 Ed. June 2023: page:69-89
2	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penerimaan Pajak (Analisis Data Tahun 2012-2023) (Agustina, Sri Wahyuni, Asrida, 2024)	X= Indeks Pembangunan Manusia Y= Penerimaan Pajak, dan data Sekunder menggunakan metode regresi linear berganda	X=Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.	Jurnal ekonomika Universitas Almuslim Bireuen-Aceh Vol.XVI No.1 Maret 2024
3	Pengaruh Pendapatan Nasional, Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak	X= Produk Domestik Bruto, Inflasi, Nilai Tukar,	X=Suku Bunga	PDB memiliki pengaruh positif signifikan sedangkan nilai tukar dan inflasi	Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Negara Tahun 2008-2022. (Nadhiya Rahma Rustian, dan Sri Yani Kusumastuti 2022)	Y= Penerimaan Pajak, dan menggunakan data kuantitatif dengan metode regresi linear berganda.		tidak signifikan terhadap penerimaan pajak	Vol. 2 No. 4 (2023):
4	Pengaruh Keterbukaan Perdagangan, Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 1990-2021 (Indira Diana Puspasari dan Masfar Gazali, 2022)	X= Produk Domestik Bruto, Inflasi Y= Penerimaan Pajak, dan menggunakan data kuantitatif dengan metode regresi linear berganda.	X=Keterbukaan Perdagangan, Penanaman Modal Asing	PDB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak	Jurnal Ekonomi Trisakti Vol. 2 No. 2 Oktober 2022: hal: 405-418
5	Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Angkatan Kerja Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2012-2017 (Ngadi Permana dan Nursaidah)	X= PDB Y= Penerimaan Pajak, dan data menggunakan data kuantitatif dengan metode regresi linear berganda	X= Inflasi, Angkatan kerja	Terdapat pengaruh positif secara parsial antara produk domestik bruto dengan penerimaan pajak. Adapun variabel inflasi periode 2012 – 2017 tidak terdapat pengaruh secara parsial dengan penerimaan pajak.	Jurnal Studia Ekonomika: Studia Ekonomika Volume 17 Nomer 1 Januari Tahun 2019 Halaman 125-140
6	<i>The Determinants of Tax Revenues: Empirical Evidence From Jordan</i>	X= Produk Domestik Bruto (GDP) Y= Penerimaan Pajak	X=Defisit fiskal, bantuan luar negeri, belanja pemerintah, dan	PDB per kapita, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak.	<i>International Journal of Financial Research</i> Vol. 12, No.

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(Ali Mustafa Al-qudah 2021)		menggunakan Metode ARDL		3, Special Issue; 2021
7	<i>Effects of Human Development Capital on Tax Revenue Performance in Kenya</i> (Brian W. Singoro 2021)	X= IPM Y= Penerimaan Pajak dan menggunakan analisis korelasi dan regresi.	X= Nilai Tukar, <i>Infrastructure Development Index</i> Menggunakan program STATA 13	Temuan tersebut menetapkan bahwa IPM memiliki hubungan positif dengan penerimaan pajak.	<i>International Journal of Business Management and Economic Research</i> (IJBMER) Vol 12(1),2021
8	<i>Determinants of tax revenue in Indonesia with economic growth as a mediation variabel</i> (Dora Dessandy Maryantika, Suparna Wijaya, 2022)	X= Indeks pembangunan Manusia, PDB Y= Penerimaan Pajak Menggunakan regresi linear berganda	X= Belanja pemerintah, Korupsi Menggunakan teknik purposive sampling	Pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.	<i>Journal IICET: JPPI</i> (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) vol 8, No 2 (2022)
9	<i>Tax Revenue and Economic Growth: A Study of Nigerian Economy.</i> (Ezekwesili, Tochukwu P. dan Ezejiofor, Raymond A, 2022)	X= Pertumbuhan ekonomi Y= Penerimaan Pajak, dan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS)	X= Suku bunga, inflasi	Penerimaan pajak tidak berpengaruh signifikan pada tingkat inflasi dan tingkat bunga	<i>International Journal of Research in Education and Sustainable Development</i> ISSN: 2782-7666 Vol. 2, Issue 3
10	Determinan Penerimaan Pajak Daerah Kabuoaten/Kota di Provinsi Bali (Aan Widi Astuti Praningrum dan Rifki Khoirudin 2019)	X= IPM Y= Penerimaan Pajak Menggunakan data <i>time series I</i>	X= PDRB, Jumlah Penduduk, Industri besar dan sedang Menggunakan metode	(1) variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. (2) variabel IPM	Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan, Hasil Penelitian dan Pengabdian

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<i>Fixed Effect Model</i>	tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. (3) variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. (4) variabel Industri Besar dan Sedang tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah.	Kepada Masyarakat: e-ISSN 2714-8785
11	Analisis Faktor Penentu Penerimaan Pajak di Indonesia dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Mediasi (Asrida, Hakim Muttaqim dan Sriwinar 2024)	X= IPM Y= Penerimaan Pajak Menggunakan data sekunder	X= Wajib pajak, pengeluaran pemerintah	IPM menunjukkan positif signifikan terhadap penerimaan pajak	<i>International Journal of Business Management and Economic Research</i> (IJBMER), Vol 12(1),2021, 1884-189
12	<i>Tax Revenue and Economic Development in Nigeria</i> (Eze Emmanuel Obgonnya dan Dike Chizalam Ogugou 2021)	X= IPM Y= Penerimaan Pajak Menggunakan regresi linear	X= Wajib Pajak	Penerimaan Pajak tidak secara signifikan mempengaruhi pembangunan manusia dan tingkat pengangguran di Nigeria	<i>American Journal of Humanities and Social Sciences Research</i> (AJHSSR) e-ISSN: 2378-703X Volume-05, Issue-12, pp-167-178

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	<i>The Determinants of Tax Revenue: A study of Southeast Asia</i> (Nguyen Minh Ha, Pham Tan Minh dan Quan Minh Quoc Binh 2022)	X= PDB Y= Penerimaan Pajak Menggunakan metode <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	X=FDI, bantuan pembangunan resmi Menggunakan data panel	PDB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak	<i>Cogent Economics & Finance</i> ISSN: 2332-2039
14	Pengaruh Keterbukaan Perdagangan, Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 1990-2021 (Indira Diana Puspasari dan Masfar Gazali 2022)	X=Pertumbuhan Ekonomi Y= Penerimaan Pajak Menggunakan analisis regresi linear berganda, dan data sekunder	X=Keterbukaan Perdagangan, Penanaman Modal Asing, Inflasi	Penerimaan pajak di Indonesia dipengaruhi secara negatif oleh variabel keterbukaan perdagangan dan penanaman modal asing. Kemudian penerimaan pajak di Indonesia dipengaruhi secara positif oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi.	Jurnal Ekonomi Trisakti Vol. 2 No. 2 Oktober 2022: hal: 405-418
15	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak di Indonesia (Dissa Bramantia 2023)	X=PDB Y= Penerimaan Pajak Menggunakan analisis regresi	X= FDI, Ekspor, Impor Menggunakan metode ECM	Variabel jangka panjang dan jangka panjang, variabel ekspor impor, dan PDB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak sedangkan PMA tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak	Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan Vol.2, No.2 Agustus 2023
16	Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi	X= Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi	Menggunakan jenis	Secara simultan inflasi dan pertumbuhan	Jurnal Akuntansi Keuangan

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia (Lely Suryani dan Andini Silvia Putri Sudarsono 2024)	Y= Penerimaan pajak Menggunakan data sekunder	kuantitatif asosiatif	ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak sementara pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak	dan Bisnis, 2(2) (2024) 329-334
17	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang (Sabam Simbolon, Etty Herijawati 2023)	X= Inflasi Y= Penerimaan Pajak Menggunakan data sekunder <i>time series</i> dan menggunakan metode analisis regresi berganda	X= Kualitas Produk, Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan penduduk tidak signifikan, pendapatan perkapita penduduk kota Tangerang berpengaruh negatif inflasi berpengaruh signifikan untuk menurunkan penerimaan pajak	Jurnal Multidisiplin Vol.1, No.2, Juni 2023
18	Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Indonesia Periode 2017-2021 (TB. Agung Amaludin dan Anggun Putri Romadhina 2023)	X= Inflasi Y= Penerimaan Pajak Menggunakan regresi linear berganda	X= Laju Pertumbuhan Ekonomi Menggunakan metode statistik deskriptif dan data panel	Secara simultan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, secara parsial laju pertumbuhan	Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 4, No.2, Januari 2023

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan variabel tingkat inflasi juga berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi di Indonesia	
19	Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Periode 2017-2021 (John Henry Wijaya 2022)	X= Inflasi Y= Penerimaan Pajak Menggunakan analisis regresi linear berganda	X= Nilai Tukar Menggunakan metode purposive sampling dengan <i>software</i> SPSS 25.00	Secara parsial dan simultan menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak.	Jurnal Computech & Bisnis, Vol. 16, No. 2, Desember 2022, 105-114
20	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015-2021 (Muhammad Rizqi, Lia Ekowati 2022)	X= PDB, Inflasi Menggunakan data sekunder, analisis regresi linear berganda	X= Nilai Tukar Menggunakan data kuantitatif asosiatif kausal	PDB, Inflasi, dan nilai tukar secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak	Prosiding SNAM PNJ (2022) Vol 3

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Hubungan Antara Produk Domestik Bruto dengan Penerimaan Pajak

Produk Domestik Bruto secara umum adalah ukuran ekonomi suatu wilayah yang hanya mencakup aktivitas di dalam negeri atau negara tersebut. Dengan demikian, hal ini dapat menilai seberapa efektif kebijakan ekonomi yang dijalankan

oleh pemerintah dan juga dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Penghitungan Produk Domestik Bruto didasarkan pada nilai tambah dari semua kegiatan produksi yang dilakukan oleh negara. Oleh karena itu, meningkatnya Produk Domestik Bruto menunjukkan pertumbuhan dalam produksi barang dan atau jasa di dalam suatu negara.

Hubungan antara PDB dan penerimaan pajak dapat dijelaskan melalui fungsi pajak yang bersifat progresif. Ketika PDB suatu negara meningkat, artinya terdapat peningkatan dalam pendapatan masyarakat dan perusahaan. Terjadinya variasi dalam pendapatan PDB bisa mencerminkan kondisi ekonomi, dan peningkatan pertumbuhan sektor usaha dalam PDB dapat membantu ekonomi yang sehat di suatu negara. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak semua wajib pajak ingin mendaftar sebagai pembayar pajak, banyak di antara mereka yang enggan membayar pajak dari sebagian pendapatan yang mereka terima, karena mereka merasa hal itu akan mengurangi kesejahteraannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliannisa et al. (2023), Isaac et al. (2021), Puspasari & Gazali (2022), Permana & Nursaidah, (2019), Qudah, (2021) menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh yang positif terhadap Penerimaan Pajak, artinya jika PDB mengalami kenaikan maka penerimaan pajak juga akan mengalami kenaikan.

2.2.2. Hubungan Antara Inflasi dengan Penerimaan Pajak

Inflasi merupakan indikator ekonomi makro yang mencerminkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks perpajakan, inflasi memiliki potensi untuk memengaruhi penerimaan pajak secara

langsung maupun tidak langsung. Ketika terjadi inflasi, nilai nominal dari transaksi barang dan jasa cenderung meningkat. Kenaikan tersebut menyebabkan dasar pengenaan pajak, khususnya untuk pajak-pajak berbasis konsumsi dan pendapatan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), juga ikut mengalami kenaikan.

Inflasi memiliki hubungan yang erat dengan penerimaan pajak, khususnya pada jenis pajak yang berbasis konsumsi dan pendapatan. Ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa dalam perekonomian turut mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan nilai nominal transaksi meningkat, sehingga basis pengenaan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga ikut naik. Selain itu, inflasi mendorong kenaikan pendapatan nominal individu maupun badan usaha. Kenaikan ini menyebabkan Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayarkan juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dalam kondisi inflasi yang moderat dan terkendali, peningkatan inflasi justru dapat memberikan dampak positif terhadap total penerimaan pajak. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa inflasi, selama tidak berlebihan, mampu memperluas ruang fiskal pemerintah melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani & Silvia (2024), Simbolon & Herijawati (2023), Amaludin & Putri (2023), Wijaya & Asy'ari (2022), Rizqi & Ekowati (2022) menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya jika Inflasi mengalami kenaikan maka penerimaan pajak akan mengalami kenaikan

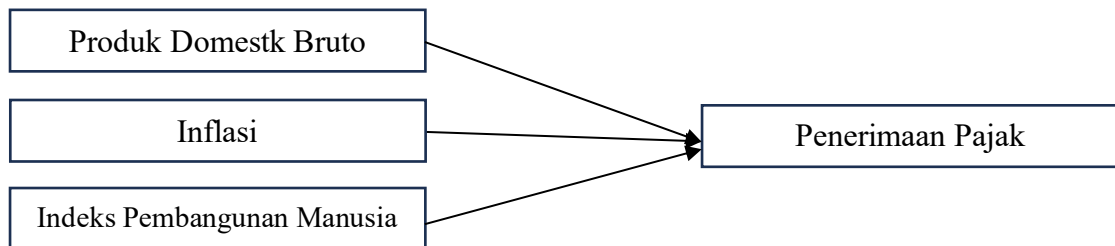
2.2.3. Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Penerimaan Pajak

Sumber daya manusia diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sifat lainnya yang dimiliki oleh individu atau kelompok orang yang diperoleh sepanjang hidup mereka dan dimanfaatkan untuk menciptakan produk, layanan, atau gagasan dalam konteks pasar (OECD, 2017). Untuk keperluan statistik, modal manusia bisa diukur secara finansial sebagai jumlah total kemungkinan pendapatan di masa depan dari populasi yang berusia kerja. Namun, ini hanya mencerminkan sebagian dari sumber daya manusia dan merupakan ukuran yang terbatas.

Hubungan antara IPM dan penerimaan pajak di Indonesia dapat dijelaskan dari berbagai dimensi, terutama melalui dampak peningkatan kualitas hidup terhadap aktivitas ekonomi, struktur pendapatan, dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Aspek yang paling utama dapat datang dari hidup yang panjang dan sehat, pendidikan yang cukup, serta standar hidup yang layak. Empat elemen esensial dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan (UNDP, 2004), menjadikan manusia bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek yang memberikan kontribusi berharga untuk kemajuan negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Isaac et al (2021), Maryantika & Wijaya (2022), Praningrum & Khoirudin (2019), Singoro (2021) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya jika IPM mengalami kenaikan maka penerimaan pajak akan mengalami kenaikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Emmanuel & Chizalam et al.,

2024) bahwa IPM memiliki pengaruh tidak secara signifikan terhadap penerimaan pajak.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3.Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah digambarkan pada gambar maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial PDB, inflasi, IPM berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak tahun 2010-2023.
2. Diduga secara simultan PDB, inflasi, IPM berpengaruh terhadap penerimaan pajak tahun 2010-2023.